

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT
(Studi Kasus PN Makassar Tahun 2012 – 2016)**



OLEH :

NURUL DEWINTA

B 111 13 100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN DENGAN SEGAJA TURUT SERTA DALAM USAHA PERJUDIAN (Studi)

OLEH :

NURUL DEWINTA

B 111 13 100

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam
Penyelesaian Studi pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2012 - 2016)

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL DEWINTA

B111 13 100

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Februari 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,MH
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris,



Dr. Nur Azisa,SH.,MH
NIP. 19671010 199202 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Dewinta
Nomor Pokok : B111 13 100
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana dalam
Tindak Pidana Pencurian Berat (Studi Kasus PN
Makassar Tahun 2012 -- 2016)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2016

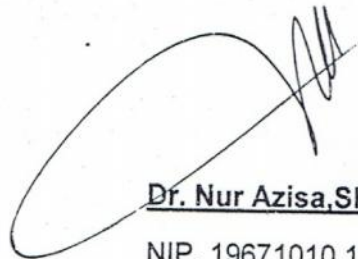
Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, SH., MH

NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL DEWINTA
Nomor Pokok	: B11113100
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Berat (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2012-2016)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Nurul Dewinta, B 111 13 100, Tinjauan Yuridis terhadap Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Berat (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2012 – 2016), dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I, dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bentuk disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian berat di Kota Makassar Tahun 2012 – 2016 dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian berat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Penelitian Lapangan dan melakukan Penelitian Kepustakaan. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara pencurian berat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012 – 2016) di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun tersebut, hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda kepada pelaku tindak pidana pencurian berat tanpa dasar pembenaran yang jelas hanya berdasarkan fakta – fakta yang diperolehnya dan keyakinan yang dimilikinya. (2) Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terdakwa, peraturan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang kita miliki dan dianut di negara kita, kekuasaan kehakiman, karakteristik dalam setiap perkara pidana berbeda, serta persepsi tentang keadilan yang berbeda – beda oleh setiap hakim dan yang terakhir adalah falsafah penghukuman yang dianut oleh setiap hakim berbeda – beda.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Berat” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad s.a.w, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis sampaikan kecuali terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sirajuddin dan Ibunda Ria yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan ibu Dr. Azisa , S.H., M.H, selaku pembimbing II terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bimbingan dan sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H, selaku penasihat akademik penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Sahabat – sahabat Penulis EtaEtaOy yaitu Ariqah Zakiyah, Yusticia Zahrani, Riany Febrianti, Jane Pricilia, Oca Kharisma, Stephanie Natassa, Mesya Assauma, Indah WDR, Nadya Khaeriyah, Reski Afrianti, Nurhikmah Dwi, Eka Fitriarningsih, Damai, dan Ismi Fatimah yang sejak dari mahasiswa baru hingga sekarang bersama – sama berjuang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terima kasih banyak atas bantuan dan

dukungannya serta saran – saran yang sangat berguna, semoga kita dapat segera meraih gelar Sarjana Hukum dan sukses kedepannya.

10. Sahabat – sahabat saya sejak SMA yaitu Inna, Lia, dan Ria yang selalu memberikan dukungan dan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman - teman Penulis Ika, Wulan, Irma, Tiara, dan Mya, juga Rino, Dapi dan Andre terimakasih juga atas dukungan yang diberikan kepada penulis untuk segera meraih gelar Sarjana Hukum.
12. Teman – teman ASAS 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman – teman KKN Reguler Gelombang 93 Tahun 2016 Kabupaten Bantaeng Kecamatan Sinoa dan Posko Induk Kabupaten. Terima kasih atas semua dukungannya.
14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah S.W.T senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Amin

Makassar, Februari 2017

Penulis,

Nurul Dewinta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	8
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	10

B. Pidana dan Pemidanaan	14
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	14
2. Teori – Teori Pemidanaan	17
3. Jenis – Jenis Pidana.....	22
C. Disparitas Pidana	45
1. Pengertian Disparitas Pidana	45
2. Dampak Disparitas Pidana	46
3. Usaha Untuk Menghadapi Akibat Disparitas Pidana.....	47
D. Tindak Pidana Pencurian	52
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	52
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian	55
3. Pencurian dengan Pemberatan	61
BAB IV METODE PENELITIAN	67
A. Lokasi Penelitian	67
B. Jenis dan Sumber Data.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
D. Analisis Data.....	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Bentuk Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian Berat di Kota Makassar tahun 20012 - 2016	71
B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana	95

BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Data Kasus Pencurian Berat yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012 – 2016) 73
2. Tabel 2 (Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana Pencurian Berat Pasal 363 ayat 1 Ke-5 Tahun 2012) 76
3. Tabel 3 (Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana Pencurian Berat Pasal 363 ayat 1 Ke-5 Tahun 2013) 77
4. Tabel 4 (Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana Pencurian Berat Pasal 363 ayat 1 Ke-5 Tahun 2014) 77
5. Tabel 5 (Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana Pencurian Berat Pasal 363 ayat 1 Ke-5 Tahun 2015) 78
6. Tabel 6 (Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana Pencurian Berat Pasal 363 ayat 1 Ke-5 Tahun 2016) 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹Pernyataan ini diperkuat dengan adanya Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Muhammad Yamin berpendapat sama, yang mengatakan bahwa :

“Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat, Government of Law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang – wenang”.

Inti dari Negara Hukum itu adalah bahwa apa yang merupakan hukum itu (sekalipun diciptakan oleh pembentuk undang – undang atau oleh badan – badan administrasi dalam batas – batas yang ditentukan oleh Parlemen itu) dipastikan benar tidaknya, ditafsirkan adil tidaknya oleh Badan Yudikatif, sedang diluar Badan Yudikatif

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal.346.

ini tidak ada instansi lain, yang berwenang menafsirkan, isi atau adil-tidaknya suatu kaidah undang – undang atau kaidah hukum itu.²

Menurut Montesquieu, salah satu kekuasaan negara yang perlu ditekankan adalah kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kebebasan Badan Yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu karena disitulah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.³

Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak diperlukan karena kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang untuk mengadili apabila ada warga negara atau rakyat yang melanggar undang – undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang – undang, berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang – undang yang diadakan dan dijalankan. Dalam mengungkap kebenaran materil hakim harus mengedepankan perasaan subyektif, cermat, dan seksama serta aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan, sikap

²Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung Alumni, 2005, hal.36 - 37

³*Ibid*, hlm.49

teliti dan hati – hati mutlak harus ada dalam menghadapi kasus pidana yang akan diputus agar tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum.

Hakim dalam menjatuhkan pembedaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang – undangan, juga mempertimbangkan nilai – nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pembedaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan putusannya

mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.

Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*).⁴

Tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan di Pengadilan Negeri Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir merupakan beberapa contoh yang penulis jadikan sebagai sampel

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet.2, Semarang: Alumni, 1992, hlm.119-120

dari adanya disparitas putusan hakim dari banyaknya putusan dalam perkara yang sama.

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Berat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk disparitas pembedaan terhadap tindak pidana pencurian berat di Kota Makassar Tahun 2012 – 2016 ?
2. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk disparitas pembedaan terhadap tindak pidana pencurian berat di Kota Makassar Tahun 2012 – 2016.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum khususnya pada bidang hukum pidana, terutama bagi yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Serta untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan untuk mengkaji secara yuridis tentang disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang dalam merumuskan undang – undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya.⁶

⁵ Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994,hlm.90

⁶ Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.2. Makassar:ASPublishing,2011. Hal.67

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur – unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif.

Menurut R.Abdoel Djamali⁷, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya. Unsur – unsur tersebut terdiri dari :

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

⁷ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.1

Menurut **Lamintang**⁸, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.10

- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda – bedakan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau disebut juga tindak pidana komisi

dan tindak pidana pasif/negative atau disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (*voordurende delicten*)
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana metril (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No.30 Tahun 2002), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa

dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidanya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.⁹

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Beberapa pengertian pidana menurut para ahli:

Menurut **Van Hamel**, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah :

⁹ Amir Ilyas, Asas – Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang education & Pukab, 2012, hlm.28

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seroang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Menurut **Simons**, pidana atau straf itu adalah :

“Suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”

Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai :

“Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”¹⁰

Beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana mengenai pengertian pidana, sebagai berikut :

a. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.

¹⁰P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta:Sinar Grafika,2010, hal.33

b. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹¹

Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut :

- (1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.¹²

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan¹³.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.4, Bandung: Alumni, 2010, hal.2

¹² *Ibid*, hlm.4

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika: 2008. hal.9

Sedangkan yang dimaksud dengan pembedaan itu sendiri, menurut Sudarto¹⁴, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dari perkataan penghukuman.

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.”

2. Teori – Teori Pembedaan

Secara tradisional teori – teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

- (1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai

¹⁴P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal.35

imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.¹⁵

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan.” Sedangkan pengaruh – pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Para pakar penganut teori ini, antara lain :

a. Immanuel Kant

Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni : seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.¹⁶

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal.105

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hal.11

Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pidana harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

b. Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*¹⁷

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita – susila, maka pidana merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

c. Herbart

Menurut pakar ini, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu,

¹⁷ Leden Marpaung , *Op.Cit*, Hal.105

pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.¹⁸

d. Stahl

Pakar ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap peri keadilan Tuhan, untuk menindaknya negara diberi kekuasaan sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.

e. Jean Jacques Rousseau

Pokok pangkal pemikiran Rousseau adalah bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di dalam pergaulan itu jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan kemerdekaannya secara penuh, akan timbul kekacauan. Untuk menghindarkan kekacauan itu, setiap orang dibatasi hak dan kemerdekaannya. Artinya, setiap orang menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan diperolehnya hak – hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang yang

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hal.12

melanggar peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan.¹⁹

(2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁰

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

(3) Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan menelaah teori – teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah

¹⁹ Leden Marpaung , *Op.Cit*, Hal.106

²⁰ Muliadi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, Hal.16

- a. Menjerakan penjahat;
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat.

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar. Sebagian negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya.²¹

3. Jenis – Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang – undang itu menyimpang (Pasal 130 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas :

- a. Pidana mati,

²¹ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 106-107

- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,dan
- d. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak – hak tertentu,
- b. Penyitaan dari benda – benda tertentu, dan
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

Kemudian dengan Undang – Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, yakni apa yang disebut pidana tutupan.²²

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, sebaliknya terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam pidana mati.

Diluar KUHP juga tercantum ancaman pidana mati, seperti pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No.21 (Prp) 1959, Undang –

²² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal.36

Undang Narkotika, dan Undang – Undang No.1 (Prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²³

Ada perbedaan pendapat tentang “hukuman mati”.Sebagian negara telah menghapuskannya.Di Indonesia ada juga pendapat ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal – hal tertentu, dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup. ²⁴

Di dalam semua peraturan perundang – undangan yang telah disebutkan diatas, pidana mati selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.

Tentang bagaimana caranya melaksanakan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, hal mana telah diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan 16 Undang – Undang Nomor 2 PNPS

²³ A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, *Op. Cit*, Hal.283 - 284

²⁴ Laden Marpaung, *Op. Cit*, Hal. 108

Tahun 1964 sebagaimana yang dimaksud di atas, yang telah menentukan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu lahir.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
- d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama.

- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi.
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
- g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat – sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Pelaksanaan dari pidana mati di dalam lingkungan peradilan militer itu pada dasarnya adalah sama dengan pelaksanaan dari pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, dengan sedikit perbedaan, yaitu :

- a. Perkataan – perkataan jaksa tinggi dan jaksa itu diganti dengan perkataan – perkataan oditur militer tinggi dan oditur militer, perkataan menteri kehakiman itu diganti dengan perkataan Panglima/ Angkatan yang bersangkutan;
- b. Perkataan regu penembak polisi itu diganti dengan perkataan regu penembak militer;
- c. Perkataan Kepala Polisi Daerah itu diganti dengan perkataan Panglima Daerah Militer atau Komandan Daerah Militer; dan
- d. Apabila terpidana mati itu adalah anggota militer, maka terpidana harus memakai pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat atau tanda – tanda lainnya.²⁵

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari pidana penjara

²⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, Hal. 49 - 51

sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup.²⁶

Pidana penjara ialah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁷

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *jus conctituendum*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut – turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup;atau jika ada pemberatan pidana atas tindakan pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana

²⁶A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 286

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, Hal.54

penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut – turut.

c. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pelepasan bersyarat

1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang – kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.

2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut :

a) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;

b) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

- 3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut – turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana.
- 4) Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui tiga bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu antara saat mulai menjalani pelepasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.
- 5) Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat ialah sebagai berikut.
 - a) Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.
 - b) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat Pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.
 - c) Jika terjadi pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri Kehakiman atas usul Hakim Pengawas.

- d) Apabila Hakim Pengawas mengusulkan pencabutan, dapat memberi perintah kepada polisi agar terpidana ditahan. Hal tersebut diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.
- e) Penahanan tersebut paling lama 60 hari.
- f) Jika penahanan tersebut diusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak ditahan.
- g) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat Pembina dari Departemen Kehakiman yang minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.²⁸

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang – orang dewasa, dan merupakan satu – satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang – orang yang telah diatur dalam Buku ke – III Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, pidana kurungan bukan merupakan jenis pidana pokok yang diancamkan semata – mata bagi

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Hal. 16

pelanggaran – pelanggaran, karena di dalam Buku ke- II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kita juga dapat menjumpai sejumlah kejahatan yang oleh pembentuk undang – undang telah diancam dengan pidana kurungan, yakni yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik – delik yang telah dilakukan secara tidak disengaja.²⁹

Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lamanya hukuman kurungan sekurang – kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.
- (3) Hukuman kurungan itu sekali – kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.³⁰

²⁹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit*, Hal. 70

³⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal. 109

Pelaksanaan pidana (hilang kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan) diatur di dalam pasal 32 KUHP, yang untuk jelasnya berbunyi :

“Pidana penjara dan pidana kurungan itu masing – masing berlaku mulai mengenai terpidana yang ada dalam tahanan sementara, pada hari keputusan hakim tidak dapat diubah lagi, dan mengenai terpidana yang lain, pada hari keputusan hakim dijalankan. (ayat 1)”

Jika dengan keputusan hakim bersama – sama dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan sedang terpidana sudah dalam tahanan sementara karena semua perbuatan itu atau karena satu dari perbuatan itu, dan keputusan untuk segala pidana mendapat ketetapan bersama – sama waktunya, maka pidana penjara mulai dijalankan pada waktu itu juga dan pidana kurungan segera mulai dijalankan pada waktu habis pidana penjara. (ayat 2)³¹

Beberapa pasal di dalam *Gestichtenreglement*, ternyata telah menentukan tentang adanya beberapa keistimewaan dan kemudahan bagi orang – orang yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana keistimewaaan atau kemudahan seperti itu telah tidak diberikan

³¹ A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Op.Cit*, hal. 294

kepada orang – orang yang menjalankan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pasal 33 ialah menentukan, bahwa kecuali orang – orang yang telah dijatuhi pidana penjara, maka lain – lain orang tahanan dengan persetujuan dari Direktur Lembaga Pemasyarakatan, dapat membawa barang – barang tertentu ke dalam lembaga pemasyarakatan, kecuali uang, barang – barang berharga dan barang – barang lainnya yang dianggap membahayakan atau yang menurut sifatnya dianggap sebagai bertentangan dengan tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pasal 57 ayat (2) menentukan, bahwa bagi orang – orang yang menjalankan pidana kurungan itu diberikan pekerjaan yang sifatnya lebih ringan daripada pekerjaan – pekerjaan yang diberikan kepada orang – orang yang menjalankan pidana penjara.

Pasal 88 ayat (2) menentukan, bahwa dengan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, orang – orang yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dapat dibenarkan untuk memakai pakaian mereka sendiri.

Pasal 93 ayat (1) menentukan, bahwa orang – orang yang sedang menjalankan pidana kurungan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan itu, atas biaya sendiri dapat mengusahakan kemudahan – kemudahan bagi hidupnya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan membeli makanan atau alat – alat tidur dengan perantaraan pengurus lembaga pemasyarakatan.³²

d. Pidana Denda

Pidana denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif.³³

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana

³² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hal. 75 - 76

³³ Laden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 109

kurungan jika tidak dibayar. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagai mana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban. Inilah yang banyak disalah mengerti orang awam, terutama dalam pelanggaran lalu lintas. Sering dipikir jika telah dibayar ganti kerugian kepada korban (kadang – kadang dengan perantaraan polisi), tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, paling – paling hanya meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktik, dirasakan banyaknya perkara demikian yang mengendap, artinya selesai di tempat, tanpa diteruskan ke Kejaksaan karena kedua pihak telah berdamai.

Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan

dalam hal gabungan (*concurcus*), residue, dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP).³⁴

Pidana denda itu tidak dikenal di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, ini tidak berarti orang – orang militer itu tidak dapat dijatuhi pidana denda karena berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer, ketentuan – ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana itu juga dapat dilakukan bagi orang – orang militer³⁵

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis – jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari ppidanaan

³⁴A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 297 - 299

³⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 80

sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.

- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.
- 3) Dalam hal pidana pokok denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing – masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Pidana kurungan pengganti denda dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan – keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat 5,6).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

Denda harus dibayar, sesuai Pasal 273KUHP : (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Uang denda dibayar terpidana menjadi milik negara (Pasal 42). Oleh karena itu, Kejaksaan setelah menerima dari terpidana, uang itu harus disetor ke kas negara.

e. Pidana Tutupan (KUHP Terjemahan BPHN,Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.³⁶

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No.20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Di dalam peraturan No.8 Tahun 1948, terlihat bahwa rumah tutupan itu berbeda dengan rumah penjara

³⁶ Drs. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet.5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 40 - 42

(Lembaga Pemsyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas – fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara. Sayangnya di dalam UU maupun PP pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu, penilaiannya, kriteria diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak – Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak – hak yang dapat dicabut tersebut adalah³⁷ :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/ TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan – aturan umum;

³⁷*Ibid*, hlm. 43 - 44

- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencahariaan.

Pencabutan hak – hak tertentu hanya untuk delik – delik yang tegas ditentukan oleh undang – undang. Kadang – kadang dimungkinkan oleh undang – undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.³⁸

b. Perampasan Barang – Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda.³⁹ Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu⁴⁰ :

- 1) Barang – barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan

³⁸A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 303

³⁹*Ibid*, hlm. 306

⁴⁰ Drs. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.49

corpora delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat, dan

- 2) Barang – barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran Hakim. Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga tersebut maka berlaku ketentuan pidana kurungan pengganti untuk pidana denda.⁴¹

c. Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana

⁴¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 23

pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang – orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati – hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang – orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).⁴²

⁴² Drs. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 53 - 54

C. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Dari Wiktionary Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa disparitas berarti perbedaan (id.wiktionary.org). Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya *“Disparity of Sentencing” sebagaimana disadur oleh Muladi*, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah *“the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification”* yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak – tindak pidana yang sama atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴³

Tidak hanya Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai *“the disturbing disparity of sentencing”* yang mengundang perhatian Lembaga Legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

⁴³Muladi, *Op.Cit*, hlm. 119.

Selanjutnya, tanpa menunjuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co'defendants*).

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

2. Dampak Disparitas Pidana

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Dari sini tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding.

3. Usaha Untuk Menghadapi Akibat Disparitas Pidana

Di dalam hal ini digunakan 2 macam pendekatan yakni :

- a. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*)

Di dalam pendekatan ini terkandung usaha – usaha :

1. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana, yang memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan. Yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan – keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.

Menurut Oemar Seno Aji, kapankah suatu hukuman dijatuhkan, erat sekali hubungannya dengan sifat ernst

dari perbuatan yang dilakukan, pribadi ataupun keadaan pribadi dari si terdakwa yang memberikan kesan bagi hakim mengenai kepribadian terdakwa dalam persidangan, baik sifat dan perbuatan maupun pribadi dari terdakwa, maka gabungan dari kedua – dua tersebut diterima pula oleh jurisprudence.

Menurut A. Mulder maupun Oomen, dalam hal ini diperlukan suatu daftar yang berisi “*checking points*” yang dapat merupakan suatu bantuan bermanfaat dalam memberikan hukuman, yang menunjuk pada points maximal tentang perbuatan dan pelakunya dan tiap – tiap kategori tindak pidana.

Menurut Sudarto, pedoman pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan daftar tersebut dimuat hal – hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal – hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal – hal yang diluar pembuat.

Dengan memperhatikan butir – butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

2. Meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana..
3. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di Eastern District of Michigan, yang disebut “*Sentencing council*”.

Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggungjawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan – kawannya di dalam lembaga ini.

Adanya lembaga ini mengandung keuntungan dan kerugian.Keuntungannya adalah bahwa keadilan di dalam pembedaan merupakan hasil dari suatu kelompok hakim dan sekaligus sifatnya tidak mengikat, tetapi cenderung untuk meratakan pidana di antara hakim – hakim yang berpartisipasi di dalamnya.Juga mempunyai fungsi pendidikan dan darisini diharapkan muncul beberapa “*sentencing standards*”.Adapun kerugiannya adalah bahwa karena *council* ini mensyaratkan “*a multi-*

judge court”, maka efektivitasnya sangat terbatas. Disamping itu pengaruhnya hanya terbatas pada pengadilan tertentu.

Untuk Indonesia mengingat jumlah hakim yang sangat terbatas dan wilayah Nusantara yang sangat luas, kiranya lembaga Hakim majelis sebanyak sekurang – kurangnya tiga orang hakim sebagaimana tersebut di dalam pasal 15 ayat (1) Undang – Undang No.14 tahun 1970 dapat dimanfaatkan pula untuk mengurangi disparitas pidana.

4. Salah satu usaha yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya diantara Pengadilan – Pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim.

Mungkin lebih banyak yang bisa dikerjakan untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim, dengan memberikan informasi tentang maslaah – masalah pemidanaan, objek pemidanaan dan bagaimana menjadi hakim yang sukses.

Keuntungan dalam hal ini adalah dapat dilakukan tanpa mempengaruhi kebebasan hakim.

- b. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects of disparity*).

Dalam hal ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam system "*indeterminate sentence*" dapat melakukan penyesuaian pidana.

Sebagai contoh dalam hal pidana bersyarat misalnya, Balai Bipa bekerjasama dengan instansi penegak hukum yang lain dapat mengusulkan hakim agar supaya orang yang sedang menjalani pidana bersyarat, diperintahkan menjalani pidananya, seandainya dia melanggar syarat umum atau syarat khusus (bagi orang yang pidananya dianggap terlalu ringan). Padahal dalam kasus – kasus yang serupa, dalam keadaan normal paling – paling hanya diberikan teguran. Demikian pula dengan memberikan

“parole” ataupun remisi bagi mereka yang pidananya terlalu berat.⁴⁴

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi – sembunyi atau diam – diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi – sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit, hlm.52 - 67

Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang penulis sebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah :

- Mengambil suatu barang
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk memilikinya secara,
- Melawan hukum.⁴⁵

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja,

⁴⁵ Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.100

yakni karena undang – undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.⁴⁶

Kiranya sudah jelas bahwa inti pengertian dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui. Karena yang dapat dikehendaki atau yang dimaksud hanyalah perbuatan – perbuatan sedang keadaan – keadaan itu hanya dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku⁴⁷ :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil;
- b. Mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
- d. Telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

⁴⁶ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 2

⁴⁷ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet-1

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian Biasa

Delik pencurian biasa di atur dalam pasal 362 KUHP :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900,--.”

Unsur – unsur yang terkandung dalam tindak pidana pencurian biasa adalah :

- (1) Perbuatan mengambil : mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan.
- (2) Yang diambil harus sesuatu barang : segala sesuatu yang berwujud , termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud,akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang –

kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

- (3) Barang itu harus, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain : sebagian kepunyaan orang lain, misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang – barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
- (4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) : orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambarnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah

menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

a. Pencurian Ringan

Delik pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900,--.”

Unsur – unsur yang terkandung di dalam delik pencurian ringan adalah :

- Pencurian biasa (pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,--
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp.250,--
- Pencurian dengan masuk tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dsb. (pasal 363 sub 5). Jika :
 1. Harga tidak lebih dari Rp.250,--

2. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

b. Pencurian dengan Kekerasan

Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 :

- “(1) dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan atau melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (KUHP Pasal 89 dan 335).
- (2) Hukuman penjara selama – lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api tau trem yang sedang berjalan.(KUHP 98,363)
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih (KUHP 363-4)
 3. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99,100,362 s)
 4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (KUHP 90)
- (3) Hukuman penjara selama – lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35,89,366)

- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3. (KUHP 339,366,486).”

Yang dimaksud dengan kekerasan sesuai dalam Pasal 89 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan dilakukan saat sebelumnya, bersama – sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

c. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Delik pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP :

- “(1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.

- (2) jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (KUHP 55 s, 72 s, 99, 370,376,394,404,141)."

Yang dimaksud cerai meja makan sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (B.W), bahwa perkawinan masih tetap, akan tetapi kewajiban suami – isteri untuk tinggal bersama serumah ditiadakan. Dalam hal ini, maka pencuriannya oleh suami atau isteri dihukum pulaakan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau isteri yang dirugikan (delik aduan). Hukum adat (Islam) bangsa Indonesia tidak mengenal perceraian meja dan tempat tidur ataupun perceraian harta benda, oleh karena itu maka bagian pasal 367 yang mengenal suami isteri yang bercerai meja dan tempat tidur atau harta benda tidak dapat diperlakukan pada mereka yang tunduk pada hukum Adat (Islam). Oleh karena itu maka terhadap pencurian antara suami isteri mereka yang tunduk pada hukum Adat (Islam) selalu tidak mungkin diadakan penuntutan dan pencurian demikian itu tidak pernah merupakan delik aduan. Dalam kedua hal tersebut, apabila suami

isteri itu sudah bercerai sama sekali, maka pencurian itu dituntut dengan tidak usah ada pegaduan.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara – cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁸

Tindak pidana pencurian dengan unsur – unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang – undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi⁴⁹ :

“Dengan hukuman penjara selama – lamanya tujuh tahun, dihukum :

⁴⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003, hal.14

⁴⁹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm.34

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama – lamanya Sembilan tahun.

2. Unsur – Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Dibawah ini akan dijelaskan unsur – unsur dalam Pasal 363

KUHP :

Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan :

1. Pencurian hewan

Yang dimaksud dengan hewan (Pasal 101) yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing,

ayam, bebek, angsa itu bukan hewan Karena tidak memamah biak, berkuku satu dan bukan babi.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

Waktu yang dimaksudkan saat kejadian malapetaka karena waktu semacam itu orang – orang semua rebut dan barang – barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri betul – betul menggunakan kesempatan itu untuk mencuri.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. (Pasal 363 ayat (1) ke-3)

Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP).Rumah maksudnya tempat yang dipergunakan

untuk berdiam siang malam. Bahkan pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, kawat, dsb.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4).

Dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya satu yang membuat, yang lainnya hanya membantu (Pasal 56). Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan member tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah,dsb.

Membongkar artinya merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela

Memecah artinya merusak barang yang agak kecil, misal memecah peti kecil, kaca jendela.

Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Yang dimaksud dengan *valse older* atau perintah palsu itu adalah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar – benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah

seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.⁵⁰

⁵⁰ P.A.F lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm.50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa data tentang perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan cukup tersedia di instansi tersebut dan juga karena beberapa perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang menarik perhatian masyarakat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri tersebut. Disamping itu, Kota Makassar merupakan domisili tetap peneliti sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara intensif dalam waktu yang sangat terbatas.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan masalah

dibahas. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Hakim dan Jaksa yang menangani perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terutama melalui penelusuran buku – buku , laporan – laporan, literatur – literatur, peraturan perundang – undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan – bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua cara, yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis

menggunakan dua cara, yaitu :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dalam persidangan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan di Pengadilan Negeri Makassar, guna

mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pejabat dari instansi terkait sebagai narasumber.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan – bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur – literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang – undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat dari relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar – dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis ilmiah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat di Kota Makassar Tahun 2012 – 2016

Untuk mengetahui disparitas pemidanaan yang terjadi pada Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan di Kota Makassar, Penulis melakukan pengumpulan data di Kota Makassar dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2012 hingga Tahun 2016). Tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan merupakan tindak pidana pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan digolongkan dalam kejahatan terhadap harta benda yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencurian ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban dan pelaku pencurian itu sendiri. Dampak buruk yang ditimbulkan pada korban, akibat pencurian yaitu kehilangan harta benda mereka dan menimbulkan trauma yang mendalam karena hartanya telah dicuri serta korban

mengalami kerugian secara materi karena harta bendanya yang dicuri oleh pelaku. Dan dampak buruk yang ditimbulkan pada pelaku pencurian, yaitu dapat diancam pidana yang telah diatur dalam Buku II KUHP dalam Pasal 363 khususnya untuk delik tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan juga mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemohan dan diasingkan dari pergaulan.

Pengadilan Negeri Makassar adalah sebuah lembaga peradilan yang terletak di wilayah Makassar. Intensitas perkara yang ditangani untuk diperiksa dan diputus cukup banyak mengenai perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Setelah dianalisis, jumlah perkara berdasarkan sumber data primer yang telah diolah, jumlah kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363, merupakan perkara yang cukup banyak diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar.

Berikut hasil pengumpulan data yang Penulis peroleh tentang banyaknya kasus yang diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam lima tahun terakhir (2012 – 2016).

Tabel 1

Data Kasus Pencurian Berat yang Diputuskan di Pengadilan

Negeri Makassar

Tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-					Pasal 363 ayat 2
	1	2	3	4	5	
2012			20	30	8	29
2013			18	32	10	36
2014			26	66	7	33
2015			29	67	9	38
2016			24	50	12	50
Total			117	245	46	186

Sumber data : Laporan Data Tahunan Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sangat sering terjadi di Kota Makassar dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar. Namun jenis pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 1 dan 2 (yakni pencurian hewan dan pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang) selama 5 tahun terakhir (Tahun 2012 – 2016) tidak pernah diputuskan di

Pengadilan Negeri Makassar. Jadi yang sering terjadi hanyalah pencurian berat yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, dan ke-5 serta pasal 363 ayat 2 dimana yang dimaksud adalah :

- Ke-3 : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya).
- Ke-4 : pencurian dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih.
- Ke-5 : pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Ayat 2 : jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5.

Dalam melakukan pembedaan, terdapat beberapa pertimbangan, yang dilakukan oleh Hakim sebelum sampai kepada putusannya. Pertimbangan Hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang – barang bukti dan pasal – pasal yang mengaturnya. Kedua, pertimbangan yang bersifat non-yuridis, berupa alasan pemberat (diluar KUHP, seperti seorang residive), alasan yang meringankan (diluar KUHP), motif dan status terdakwa.

Berdasarkan banyaknya kasus yang diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindak pidana pencurian berat dalam lima tahun terakhir, penulis hanya mengambil beberapa kasus sebagai sampel adanya disparitas pembedaan yang memiliki karakteristik kasus yang sama dimana kasus yang penulis ambil diatur di dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Karakteristik kasus yang diambil penulis sebagai sampel yaitu :

- Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu;
- Barang yang dicuri adalah sepeda motor;

- Pelaku adalah seorang dewasa yang baru melakukan tindak pidana.

Berdasarkan karakteristik kasus diatas, maka berikut adalah daftar perkara yang menunjukkan adanya disparitas pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan penjatuhan pidana penjara yang berbeda dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Tabel 2

**Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana
Pencurian Berat (Pasal 363 ayat 1 Ke-5) Tahun 2012**

No. Perkara	Nama	Umur	Tuntutan	Putusan
290/Pid.B/2012/PN.Mks	Aden	27	11 Bulan	10 Bulan
291/Pid.B/2012/PN.Mks	Uga	29	1 Tahun	8 Bulan
962/Pid.B/2012/PN.Mks	Dada	27	1 Tahun	11 Bulan
851/Pid.B/2012/PN.Mks	Tris	29	1 Tahun	1 Tahun
			7 Bulan	6 Bulan
191/Pid.B/2012/PN.Mks	Sani	34	2 Tahun 4 Bulan	2 Tahun

Sumber data : Buku Register Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 3

**Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana
Pencurian Berat (Pasal 363 ayat 1 Ke-5) Tahun 2013**

No. Perkara	Nama	Umur	Tuntutan	Putusan
187/Pid.B/2013/PN.Mks	Mawan	20	6 Bulan	4 Bulan
685/Pid.B/2013/PN.Mks	Syahrul	27	1 Tahun 5 Bulan	1 Tahun
689/Pid.B/2013/PN.Mks	Aziz	28	11 Bulan	9 Bulan
692/Pid.B/2013/PN.Mks	Takdir	28	10 Bulan	8 Bulan
1633/Pid.B/2013/PN.Mks	Akbar	22	1 Tahun	11 Bulan

Sumber data : Buku Register Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 4

**Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana
Pencurian Berat (Pasal 363 ayat 1 Ke-5) Tahun 2014**

No. Perkara	Nama	Umur	Tuntutan	Putusan
1778/Pid.B/2014/PN.Mks	Lupus	22	2 Tahun 4 Bulan	2 Tahun

1890/Pid.B/2014/PN.Mks	Rahmat	29	1 Tahun 3 Bulan	10 Bulan
1920/Pid.B/2014/PN.Mks	Joko	27	2 Tahun 3 Bulan	1 Tahun 8 Bulan
1934/Pid.B/2014/PN.Mks	Takdir	20	6 Bulan	4 Bulan
1939/Pid.B/2014/PN.Mks	Sandi	21	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun 6 Bulan

Sumber data : Buku Register Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 5

**Sampel Disparitas Pidana yang Terjadi pada Tindak Pidana
Pencurian Berat (Pasal 363 ayat 1 Ke-5) Tahun 2015**

No. Perkara	Nama	Umur	Tuntutan	Putusan
817/Pid.B/2015/PN.Mks	Wendy	27	1 Tahun 6 Bulan	1 tahun
820/Pid.B/2015/PN.Mks	Agus	30	2 Tahun	1 Tahun 6 Bulan
268/Pid.B/2015/PN.Mks	Irwan	22	10 Bulan	6 Bulan
269/Pid.B/2015/PN.Mks	Syahril	21	10 Bulan	9 Bulan
279/Pid.B/2015/PN.Mks	Syarif	23	6 Bulan	8 Bulan

Sumber data : Buku Register Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 6

Sampel disparitas pidana yang terjadi pada tahun 2016

No. Perkara	Nama	Umur	Tuntutan	Putusan
1027/Pid.B/2016/PN.Mks	Pascal	23	1 Tahun	1 Tahun
314/Pid.B/2016/PN.Mks	Aris	29	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun 4 Bulan
331/Pid.B/2016/PN.Mks	Awal	25	1 Tahun 4 Bulan	1 Tahun
998/Pid.B/2016/PN.Mks	Rusli	19	10 Bulan	7 Bulan
512/Pid.B/2016/PN.Mks	Aldi	21	2 Tahun 4 Bulan	2 Tahun

Sumber data : Buku Register Pengadilan Negeri Makassar

Table diatas menunjukkan data perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan tahun 2012 hingga tahun 2016. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa selama lima tahun terakhir ini (tahun 2012 – tahun 2016) lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya sangat beragam yaitu mulai dari hukuman terendah 4 bulan pidana penjara, pada No.perkara 187/Pid.B/2013/PN.Mks yang dilakukan oleh Mawan yang berusia 20 tahun dan sampai hukuman maksimal 2 tahun

pidana penjara dengan No.perkara 191/Pid.B/2012/PN.Mks yang dilakukan oleh Sani yang berusia 34 tahun. Hal tersebut terjadi karena hakim memiliki kebebasan penuh dalam menjatuhkan pemidanaan. Pemidanaan yang bervariasi tersebut dapat terjadi karena nilai keadilan setiap orang berbeda, begitu juga dengan nilai keadilan yang dirasakan hakim. Karena rasa keadilan adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai keadilan dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tak dapat diindra oleh manusia.

Setiap orang memiliki tingkatan rasa keadilan dan pandangan tentang keadilan yang berbeda – beda. Hakim juga merasakan hal tersebut, dalam beberapa kasus yang serupa seorang hakim bisa saja memberikan penilaian tentang rasa keadilan yang berbeda – beda setiap kasus yang ditangani. Hal tersebut berdampak pada terjadinya disparitas pemidanaan. Apalagi untuk kasus serupa yang proses peradilannya diputuskan oleh hakim yang berbeda – beda.

Untuk lebih memahami perbandingan perkara yang terjadi disparitas pemidanaan, penulis menguraikan 2 perkara tindak pidana pencurian berat satu persatu sebagai contoh yang

menurut penulis memiliki karakteristik kasus yang sama.

Perkara – perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan yang Mengandung Disparitas Pidana di Pengadilan Negeri Makassar

a. Putusan No. 998/Pid.B/2016/PN.Mks

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Muh.Rusli Als. Rusli Bin Muhamud**

Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 9 September 1996

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Kampung Tambasa III Kec.Tamalanrea

Agama : Islam

Pekerjaan : Jual Roti

Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 10 April 2016 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamud**;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 01 Juni 2016;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamud** bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamud** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Barang bukti berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki ninja RR warna Hijau No.Pol. DD 5769 XQ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HARTIMANG,SE;
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar hukumannya diringankan dengan alasan punya tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamid telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan :
Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni, 1. Hartimang, SE, 2. Magfirah Rahmat, dan 3. Irwan Yusuf selain itu terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara ;

Menimbang bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pidana sebagai mana terurai dalam amar putusan dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijalani pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya serta memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal – pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan perundang – undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- Menjatuhkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR warna Hijau No.Pol. DD 5769 XQ dikembalikan kepada pemiliknyayaitu HARTIMANG, SE ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

b) Putusan No.512/Pid.B/2016/PN.Mks

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara – perkara pidana pada tin gkat pertam dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Aldi Allo Makdika**

Tempat lahir : Mamasa

Umur/ Tgl Lahir : 21 tahun / 12 Mei 1994

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kepala III Lr.1 Kota Makassar

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Aldi Allo Makdika**;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Allo Makdika** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** “, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aldi Allo Makdika**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit seped motor Yamaha Vixion warna hitam No. mesin : G3E7E-0107579 STNK a.n Sumiati Kadir, dikembalikan kepada korban a.n Ambo Ugi;
 - b. 1(satu) buah kunci duplikat warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan disidang yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 1. Ambo Ugi, 2. Jumria Umar, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi dn keterangan terdakwa dan didukung pula oleh barang bukti yang saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita kerugian senilai Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal (dakwaan yang terbukti) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Allo Makdika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aldi Allo Makdika** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unti sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Mesin G3E7E-0107579 STNK a.n Sumiati Kadir, dikembalikan kepada korban a.n Ambo Ugi;
 - b. 1(satu) buah kunci duplikat warna hitam silver, dirampas untuk dimusnahkan;

- c. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Perbedaan pemidanaan yang terjadi dalam beberapa perkara pencurian berat yang diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar ini terjadi karena setiap perkara memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda. Sehingga dalam memutuskan perkara tersebut hakim memiliki cara pandang yang berbeda pula dalam setiap perkara yang dihadapinya.

Pada perkara No. 512/Pid.B/2016/PN.Mks dengan pelaku Aldi Allo Makdika, pelaku dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 sehingga jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dengan pertimbangan bahwa si pelaku tidak hanya melakukan pencurian berat yang membuat korban kehilangan sepeda motornya, tetapi juga mengambil uang tunai korban sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) milik korban yaitu Ambo Ugi.

Sedangkan perkara No. 998/Pid.B/2016/PN.Mks dengan pelaku Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamud, pelaku dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 sehingga jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

bulan dengan pertimbangan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Tetapi hakim memiliki pertimbangan sendiri dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim memperhatikan bahwa usia si pelaku masih sangat muda dan baru melakukan suatu perbuatan tindak pidana sehingga hal tersebut menjadi salah satu hal yang meringankan pelaku. Pelaku juga mengakui semua perbuatannya secara terus terang dan terbuka di persidangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, hakim yang menangani kasus ini, memutuskan pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk perkara pidana no.512/Pid.B/2016/PN.Mks dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan untuk perkara pidana No.998/Pid.B/2016.

Dengan melihat dua perkara pidana yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis berpendapat bahwa bentuk disparitas pembedaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara pencurian berat selama

lima tahun terakhir ini, merupakan suatu kesenjangan pemidanaan karena mencederai rasa atau nilai keadilan.

2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim

Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim di beberapa perkara dalam tindak pidana pencurian berat dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 telah diuraikan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam praktek peradilan sehari – hari sifat yang baik dari terdakwa dapat meringankan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Sedangkan sifat jahat dari terdakwa dapat memberatkan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim.

Pada perkara pidana No.998/Pid.B/2016/PN.Mks dengan terdakwa bernama Muh. Rusli Als. Rusli Bin Muhamud umur 19

tahun, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Dan pada perkara No. 512/Pid.B/2016/PN.Mks dengan terdakwa bernama Aldi Allo Makdika umur 21 tahun, hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara dengan pertimbangan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita kerugian senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Dengan melihat dua perkara diatas maka penulis berpendapat bahwa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana. Sebab dalam setiap kasus yang ditangani oleh hakim, hakim berhadapan dengan pelaku yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut.

2. Peraturan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP yang kita miliki dan dianut di negara Indonesia memiliki kelemahan karena dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Serta di dalam KUHP, tidak diatur batas minimal hanya batas maksimal dari sanksi pidana sehingga problematika disparitas pidana semakin besar.

3. Kekuasaan Kehakiman

Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari pengaruh pihak manapun. Berdasarkan kewenangan hakim yang diatur dalam undang – undang tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.

4. Karakteristik Kasus

Menurut Beccaria⁵¹ :

“ setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi.”

⁵¹ Eva Achjani, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung : Lubuk Agung, 2011, Hlm. 57

Walaupun dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Dengan meilihat data lima tahun terakhir yang telah diolah oleh penulis dapat terlihat bahwa walaupun sama – sama dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, tetapi bentuk ppidanaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda. Menurut penulis, setiap kasus berdiri sendiri tidak saling berkaitan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dalam proses peradilan yang berlangsung, hakim akan memperhatikan aspek – aspek sosiologis dan kriminologi yang terletak pada setiap perkara.

5. Persepsi tentang Keadilan yang Berbeda oleh Setiap Hakim

Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap adil aatau tidaknya hakim dalam memutuskan setiap perkara. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai suatu keadilan. Dalam kasus yang serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas pidana apalagi jika kasus yang serupa itu ditangani oleh hakim yang berbeda.

6. Falsafah Penghukuman yang Dianut oleh Hakim

Falsafah hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda – beda. Misalnya saja apabila seorang hakim menganut falsafah pembalasan. Hakim tersebut memandang bahwa pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita. Dasar penjatuhan pidana yaitu pidana yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah pembinaan memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pidana tersebut bermaksud untuk memperbaiki sifat diri pelaku. Jadi, falsafah hakim merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Makassar kepada salah satu Hakim yaitu bapak Kristijan P. Djati, S.H, berpendapat bahwa sistem pidana disparitas terjadi karena di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai ancaman pidananya sudah ditentukan

dan hakim hanya dapat berpatokan pada maksimal pidananya karena minimal pidananya tidak diatur dan dalam prakteknya hakim menjatuhkan pidana dengan melihat fakta yang terjadi, hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan yang juga termasuk unsur – unsur di dalam undang undang dan dengan tujuan memberikan efek jera.

Yang dapat membedakan penjatuhan pidana ada beberapa faktor, misalnya faktor terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau telah melakukan tindak pidana. Atau cara pelaku dalam melakukan kejahatan seperti dilakukan bersama – sama atau pada waktu malam hari dapat menjadi alasan – alasan yang memberatkan.

Faktor utama penyebab terjadinya disparitas pidana adalah Hakim memiliki tingkat rasa keadilan yang berbeda di setiap kasus yang berbeda apalagi hakim yang berbeda. Selain itu di dalam KUHP hanya menentukan batas maksimal pidana, sehingga hakim diberikan kebebasan penuh dalam memilih lamanya penjatuhan pidana yang tepat menurutnya. Terjadinya disparitas pidana sangat sulit untuk diatasi karena setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda dan nilai keadilan itu relative tergantung darimana kita melihatnya.

Muladi di dalam bukunya juga membahas tentang faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Mengingat kompleksitas daripada kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu sub sistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor – faktor tersebut akan bersifat multi kausal dan multi dimensional.

Pertama – tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang – undang.

Sebagai contoh, adalah perumusan pasal 188 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tigaratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang.”

Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama

secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan. Hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Disamping itu, Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang – undang hanyalah maksimum dan minimumnya.⁵²

Dalam batas – batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.⁵³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudarto⁵⁴ menyatakan sebagai berikut :

“ KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang – undang yang memuat asas – asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.”

Setelah ditinjau secara mendalam faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi dilain pihak mengandung kelemahan – kelemahan berhubung adanya “*judicial*

⁵² Muladi & Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm.57

⁵³ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta,1978, hal.9

⁵⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung,1981. Hal.79-80

discretion” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standards*”, maka dibawah ini akan dibahas faktor – faktor penyebab terjadinya disparitas yang bersumber pada diri Hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Sifat internal dan eksternal kadang – kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh – pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.

Hal – hal tersebut diatas sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidanaanya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Suatu contoh yang agak ekstrim yang dapat dikemukakan di sini adalah hasil observasi yang dilakukan Reid mengenai persepsi seorang Hakim tentang ras diskriminasi dan implementasinya di dalam penjatuhan pidana, di Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa pada khususnya, orang – orang yang berkulit hitam (*negro*) sering diperlakukan tidak adil di dalam pembedaan.

Pidana biasanya lebih berat dan jarang diberikan lepas bersyarat atau pidana percobaan.

Dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang berkulit putih, mereka jarang mendapatkan pengampunan (grasi) dan jarang pula mendapatkan komutasi (perubahan pidana) sehubungan dengan pidana mati yang dijatuhkan terhadap mereka.

Selanjutnya, persepsi Hakim terhadap "*philosophy of punishment*" dan "*the aims of punishment*", yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai "*the basic difficulty*", sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang Hakim mungkin berpikir bahwa tujuan berupa "*deterrence*" hanya bisa dicapai dengan pidana penjara.

Namun dilain pihak dengan tujuan yang sama, Hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif.

Dengan adanya pengaruh aliran modern tersebut di mana "... *the era of faith*" digantikan oleh "*scientific age*" yang didasarkan atas penemuan – penemuan ilmu – ilmu sosial maupun ilmu – ilmu alam guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor – faktor penyebab disparitas pidana makin banyak. Hal ini

disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu baik fisikal, mental maupun lingkungan sebagai keadaan – keadaan yang meringankan....”

Sebagai contoh dalam hal ini faktor – faktor jenis kelamin (sex), residivisme dan umur (age).

Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati.

Pidana terhadap residivist akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia (ps.486, ps.487 dan ps.488 KUHP) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperberat pidana.

Demikian juga masalah umur sangat berperan.

Dilandasi filsafat yang mendasari “*juvenile court*” maka pidana terhadap “*young offenders*” akan lebih ringan (ps.47 KUHP). Bahkan, pada ps.45 KUHP disertakan alternatif – alternatif lain bagi Hakim berupa system tindakan (*maatregelen*). Disamping faktor – faktor yang melekat pada si pelaku tindak pidana tersebut (yang sebenarnya jumlahnya banyak), terdapat pula faktor objektif yang akan mempengaruhi Hakim yang antara lain adalah “*impressions of the seriousness of cases*”.

Menelaah secara mendalam sumber – sumber disparitas pidana tersebut, maka sebenarnya semuanya bermuara pada wawasan (*outlook*)

dalam arti pemahaman serta konsistensi kita bersama di dalani mengikuti aliran hukum pidana.

Aliran – aliran ini tidak mencari dasar pembenaran dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Secara garis besar, aliran – aliran ini dapat dibagi menjadi tiga yakni klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik.

1. Aliran klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancient regime*” yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidak-adilan.

2. Aliran modern

Aliran ini timbul padaa abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat.

Aliran ini sering juga disebut aliran positif, karena di dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih diperbaiki.

3. Aliran neo-klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik dengan "*doctrine of free will*-nya, tetapi dengan modifikasi tertentu.

Dari perbandingan antar aliran – aliran dalam hukum pidana tersebut, jelas bahwa persoalan disparitas pidana tidak akan muncul bilamana kita menganut aliran klasik yang di dalam pemidanaan mendasarkan diri pada "*definite sentence*", yang tidak memungkinkan sama sekali adanya "*judicial discretion*".

Yang penting dalam hal ini adalah konsistensi kita di dalam menganut salah satu aliran. Seandainya kita memang memilih aliran modern atau neo-klasik maka harus konsisten dengan segala konsistensinya.

Di dalam hal disparitas pidana, yang penting adalah sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas "*reasonable justifications*".⁵⁵

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, Hlm. 56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana berat sangat sering terjadi di Kota Makassar dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dalam lima tahun terakhir. Namun jenis pencurian berat yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 1 dan ke-2 tidak pernah diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dalam lima tahun terakhir. Bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Makassar terhadap tindak pidana pencurian berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012 – 2016) sangat bervariasi, yaitu mulai sanksi pidana yang paling rendah 4 bulan pidana penjara sampai pada sanksi tertinggi yaitu 2 tahun pidana penjara. Dari data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda kepada pelaku tindak pidana pencurian berat tanpa dasar pembenaran yang jelas

hanya berdasarkan fakta – fakta yang diperolehnya dan keyakinan yang dimilikinya.

2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa. Peraturan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Persepsi hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dan yang terakhir adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan pembedaan berbeda – beda, apakah hakim itu menganut falsafah pembedaan pembalasan atau sebagai pembinaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar tentang “Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan”, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah yang lebih baik untuk menjaga eksistensi suatu lembaga peradilan. Saran – saran yang dikemukakan oleh penulis, adalah :

1. Diperlukan adanya suatu pedoman bagi hakim yang kemungkinan dapat digunakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya guna mengecilkan adanya disparitas pembedaan. Karena di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang kita anut, hanya mengatur tentang batas maksimum pidana. Sehingga kemungkinan terjadinya disparitas pidana sangat besar. Dengan adanya suatu pedoman, diharapkan mampu meminimalkan adanya disparitas pidana.
2. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta

dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang – undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, "Pengantar Hukum Indonesia" Cet.2. Makassar:ASPublishing,2011.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet.5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education & Pukab,2012

Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

A.Z.Abidin Farid & A.Hamzah "*Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*" Edisi Revisi. Jakarta:Raja Grafindo Persada:2006

Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*" Cet.3.Jakarta:Sinar Grafika:2008.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011

Leden Marpaung "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*".Jakarta: Sinar Grafika,2005

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.4, Bandung: Alumni,2010.

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika,2009.

_____, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung : Alumni,2005

R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers,2010

Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta,1978

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung,1981

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 21 Desember 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ *278* /HKM/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH..MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL DEWINTA
No.Pokok : B11113100
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Andi Tonro 4 Selatan No. 7 Makassar
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar
sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016, dan
telah dibimbing oleh :

1. KRISTIYAN P. DJATI, SH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan
dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, tanggal 01 Desember 2016 Nomor : 16542/UN4.5.3/ PL.02/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

PANITERA /

BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007